



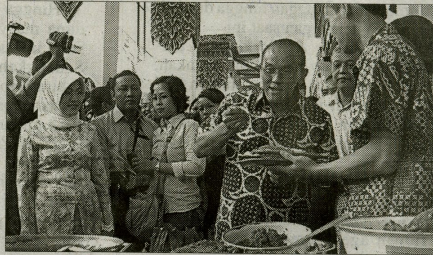
Wali Kota Kritisi Kebijakan Pusat

Fokus Perkotaan, PNPMM Mandiri Berakhir 2015

JOGJA - Akibat urbanisasi tahun lalu, penurunan angka kemiskinan di desa justru lebih tinggi dibanding wilayah kota. Pemerintah pusat berharap, tahun ini bisa terjadi penurunan angka kemiskinan secara drastis baik di kota maupun perdesaan. Karena itu bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diberikan bagi masyarakat kota terbilang lebih tinggi dibanding perdesaan.

Dana PNPMM tahun lalu dikucurkan Rp 1,5 miliar per kecamatan. Tahun 2009, PNPMM per kecamatan untuk wilayah kota sebesar Rp 2,6 miliar, sedangkan perdesaan Rp 2,3 miliar.

Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie mengatakan, tingginya urbanisasi disebabkan pengaruh bahwa hidup di kota lebih menjanjikan. "Padahal tidak demikian," ujar Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, dalam kunjungannya untuk menyerahkan bantuan langsung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Provinsi DIJ di Aula



UENAKE: Menkokesra Aburizal Bakrie mencicipi nasi gudeg di Balai Kota Timoho, kemarin.

Balai Kota Timoho, kemarin. Ical berharap, tahun 2010 mendatang besaran dana PNPMM bisa meningkat lagi menjadi Rp 3 miliar per kecamatan, baik di Kota maupun perdesaan.

Dalam kesempatan itu, Ical menyerahkan bantuan kepada lima kepala daerah yang mewakili di wilayah Provinsi DIJ. Antara lain, Pemkot Jogja menerima dana Rp 11,49 miliar untuk PNPMM di 14 kecamatan, Pemkab Bantul Rp 12,175 miliar untuk 12 kecamatan kota dan Rp 9,90 miliar untuk 5 kecamatan perdesaan. Kabupaten Sleman menerima Rp 14,9 miliar untuk 15 kecamatan kota dan Rp 2,90 miliar bagi dua kecamatan perdesaan.

Pemkab Kulonprogo mendapat Rp 1,4 miliar untuk satu kecamatan kota dan Rp 20,20 miliar untuk 11 kecamatan perdesaan, sedan-

gan Gunungkidul menerima bantuan sebesar Rp 39,20 miliar untuk 18 kecamatan di wilayah perdesaan.

Wali Kota Herry Zudianto mengatakan, bantuan PNPMM memang dibutuhkan bagi warga kota. Itu sesuai target pemkot 2009 di mana program penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama.

Hanya, menurut Herry, terjadi penumpukan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pemkot. Pasalnya, pemkot telah mempunyai program bantuan dana blockgrant yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik.

Sementara program dalam PNPMM dibagi 70 persen untuk pembangunan fisik, 20 persen ekonomi, dan 10 persen sosial. Oleh karenanya, Herry meminta agar tahun 2010 pemerintah pusat sebaiknya menyesuaikan program daerah. (yog)

ida.
a Y
lali
ris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembangunan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005